

■ BAB XI

RAKYAT
MENANTIKAN
GOOD
GOVERNANCE



RAKYAT MENANTIKAN GOOD GOVERNANCE

Sejak masa-masa akhir tumbangya pemerintahan Soeharto hingga sekarang, kita seringkali mendengar berbagai pernyataan yang intinya menyerukan *good governance*. Istilah ini hingga saat ini masih tetap populer; tak hanya muncul dalam diskusi-diskusi kalangan akademisi dan intelektual, tetapi juga seringkali dilontarkan para pejabat negara disetiap pidato mereka. Realisasinya, hingga sekarang tetap nol besar. Kasus Bank Century yang sampai sekarang masih menjadi sorotan publik, menjadi salah satu bukti bahwa jauh panggang dari api. Dan masih banyak indikator-indikator lain yang memposisikan *good governance* ternyata baru sebatas wacana. Lantas kapan terwujudnya?

Banyak pihak yang mendefinisikan *good governance* secara berbeda-beda. Penulis mengutip definisi *good governance* menurut versi World Bank, yaitu suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Tegasnya, *good governance* adalah pengelolaan pemerintahan yang baik; birokrasi berfungsi secara efektif sebagai pelayan masyarakat, sehingga dipercaya dan dihormati oleh masyarakat.

Pelaksanaan *good governance* tergantung pada kemampuan untuk menggunakan kekuasaan dan mengambil keputusan sepanjang waktu, dalam spektrum ekonomi, sosial, lingkungan, hukum, dan sektor-sektor lainnya. Ini juga terkait dengan kemampuan pemerintah untuk mengetahui, menengahi, mengalokasikan sumber daya, menerapkan serta memelihara hubungan-hubungan yang penting.

A. VISI STRATEGIS

Para pengelola pemerintahan seyogyanya memiliki perspektif yang luas dan jatuh ke depan atas proses pembangunan, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

B. KEPASTIAN HUKUM

Hukum merupakan faktor penting dalam penegakan *good governance*. Lemahnya sistem hukum dipastikan akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan, sehingga *good governance* tidak akan berjalan mulus di atas sistem hukum yang lemah. Oleh karena itu penguatan sistem hukum atau reformasi hukum merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya *good governance*.

Kepastian hukum menjadi syarat mutlak terciptanya *good governance*. Dalam konteks ini, jelas memerlukan pemerintahan yang bebas dari insentif-insentif yang distortif, melalui korupsi, kolusi, nepotisme atau terjebak dalam kepentingan sempit kelompok kepentingan tertentu; menjamin hak-hak kepemilikan dan pribadi; serta mencapai stabilitas sosial dalam tahap tertentu. Ini akan memberi kepastian hukum yang penting bagi sektor swasta dan masyarakat untuk mengambil keputusan yang baik.

Kepastian hukum memerlukan stabilitas politik. Pemerintahan harus mampu membuat komitmen-komitmen yang bisa dipercaya, dan meyakinkan sektor swasta bahwa keputusan-keputusan yang diambil pada akhirnya tidak akan dicabut akibat ketidakpastian politik. Meski hal ini tidak secara khusus terkait dengan sistem politik tertentu dalam jangka pendek, dalam jangka panjang demokrasi meningkatkan stabilitas dengan memberikan pada masyarakat suara untuk mengekspresikan pilihan-pilihan mereka melalui persaingan yang terbuka dan sehat.

Transparansi dan sistem informasi yang terbuka

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas.

Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau oleh publik.

Keterbukaan merupakan aspek yang penting dalam *good governance*, dan pengambilan keputusan yang transparan penting bagi sektor swasta untuk membuat keputusan serta investasi yang baik. Pertanggungjawaban dan aturan hukum memerlukan keterbukaan dan informasi yang baik sehingga jenjang administrasi yang lebih tinggi, pengawas eksternal serta masyarakat umum dapat melakukan verifikasi terhadap kinerja administrasi pemerintahan dan kesesuaiannya terhadap hukum.

C. KEMAMPUAN MANAJERIAL & MORALITAS YANG BAIK

Kemampuan teknis dan manajerial para pengelola pemerintahan merupakan faktor yang jelas harus dimiliki dalam *good governance*. Pada saat ini, kedua kemampuan ini tidak terlalu menjadi hambatan lagi, sebagaimana dimasa lalu, karena membaiknya tingkat pendidikan, tapi perubahan yang cepat membutuhkan pengembangan keterampilan yang terus menerus. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah aspek moralitas. Kemampuan teknis jika tak diimbangi oleh moralitas, justru akan memicu tindakan koruptif dan manipulatif pada pelaksanaan teknis di lapangan.

Kemudian, *good governance* juga harus dibangun berdasarkan kualitas organisasi, sehingga pengembangannya dilakukan berdasarkan pada hal ini, bukan hanya pada kemauan politik, maupun kemauan pribadi seorang pemimpin yang kuat serta kekuasaan negara, yang tidak akan bertahan lama dalam jangka panjang. Kemampuan organisasi-organisasi pemerintahan merupakan faktor kunci yang untuk menyiapkan layanan-layanan jasa bagi kepentingan usaha maupun masyarakat, dan untuk menyiapkan kondisi bagi kemajuan ekonomi serta kohesi sosial.

D. TERJAGANYA AKUNTABILITAS

Saat ini, bukan eranya lagi pelaksanaan pembangunan asal-asalan. Publik mengharapkan akuntabilitas, sehingga semua proses pembangunan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban dapat menjadi tujuan; yaitu mencerminkan nilai-nilai demokratik, serta dapat pula menjadi cara menuju pengembangan organisasi yang lebih efektif dan efisien. Para politisi serta birokrasi memiliki kekuasaan yang besar melalui hukum dan aturan yang mereka terapkan, sumber daya yang mereka kendalikan serta organisasi yang mereka kelola. Pertanggungjawaban adalah kunci untuk menjamin bahwa kekuasaan ini digunakan secara layak dan sesuai dengan kepentingan publik. Pertanggungjawaban memerlukan kejelasan tentang siapa yang bertanggung jawab pada siapa, untuk apa dan bahwa pegawai negeri sipil, organisasi serta para politisi harus mempertanggungjawabkan keputusan serta kerja mereka.

E. PARTISIPASI PUBLIK

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Partisipasi dapat mencakup pertemuan-pertemuan konsultasi dalam pengembangan kebijakan dan pengambilan keputusan serta proses-proses demokratik. Partisipasi memberikan pada pemerintah akses pada informasi penting tentang kebutuhan dan prioritas orang per orang, masyarakat serta usaha swasta. Pemerintah, yang mencakup masyarakat, akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengambil keputusan dan keputusan tersebut akan memperoleh dukungan yang lebih besar setelah diambil. Meski tidak ada hubungan langsung antara demokrasi dan setiap aspek *good governance*, jelas bahwa pertanggungjawaban, transparansi dan partisipasi diperkuat oleh demokrasi, dan ketiga faktor ini merupakan pendukung kualitas demokrasi.

F. MENCERMATI

Dilihat dari kondisi berkembang di masyarakat saat ini berkesimpulan bahwa ketidakpekaan publik terhadap para penguasa menurun. Indikator yang paling penting adalah, di tengah sulitnya rakyat mendapatkan penghasilan, lalu lintas pembayaran (baca: korupsi) di pusat ternyata lancar. Belum lagi persoalan-persoalan hukum yang timpang dan cepat membela si kuat. Kian menggelengkan rasa ketidakpercayaan masyarakat kata versus Rumah Sakit Omni Internasional dapat dijadikan pelajaran berharga.

Berawal dari konteks diatas, pemerintah perlu segera mengembalikan menaikan kepercayaan publik. Untuk tegakkan supremasi hukum, berikut ini keamanan bagi seluruh masyarakat, tuntaskan kasus-kasus korupsi, kolusi dan kejelasan kebijakan pemerintah yang integritas dan profesionalisme birokrasi pemerintah dalam menjalankan program, stabilitas sosial dan politik adanya kepemimpinan nasional yang selalu meningkat baik.

Masyarakat yang berdaya (*civil*) khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan merupakan perwujudan *good governance*. Masyarakat saat ini akan solid dan berpartisipasi dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintah. Selain itu masyarakat macam ini juga akan menjalankan pengawasan yang efektif dalam

pelaku penyelenggaraan pemerintahan. Sebaliknya, pada masyarakat yang masih belum berdaya di hadapan dan masih banyak timbul masalah di dalamnya, akan sangat kecil kemungkinan good governance bisa ditemukan. Salah satu agenda untuk mewujudkan good governance pada masyarakat semacam ini adalah memperbaiki masalah sosial yang sedang dihadapi.

Di bidang ekonomi, pemulihan kami harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat kebanyakan. Hal ini praktis sebagai prasyarat mutlak untuk membangun penguatan legitimasi pemerintah, yang gilirannya merupakan bekal berhadapan percepatan proses pembaharuan komprehensif menuju good governance. Sulitnya masyarakat mendapatkan penghasilan, akan melahirkan 1 masalah sosial yang bila tidak tertangani mengganggu kinerja pemerintahan menyeluruh. Segera dilakukan pemulihan ekonomi, bukan malah membuat konforntasi dengan para ekonomi mikro seperti banyaknya gusuran PKL yang tidak manusiawi dan lain sebagainya.

G. LATIHAN

1. Bagaimana pelaksanaan good governance di Indonesia?
2. Bagaimana prinsip-prinsip *good governance*?